

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2015-2019**

DesiIstiza¹

dessyistiza29@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Universitas Baturaja

Anis Feblin²

feblinfatullag@gmail.com

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Baturaja

Yulitiawati³

yulitiawati0707@gmail.com

Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Baturaja

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Local Own-Source Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Regency/City Governments in South Sumatra Province in 2015-2019 partially or simultaneously. This type of study is quantitative descriptive research and is carried out using secondary data in the form of 2015-2019 APBD realization reports. The data collection technique in this study is documentation, this study uses the census method. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that partially there is a significant positive influence of Local Own-Source Revenue (X1) on Regional Government Financial Performance (Y), and the Balanced Fund (X2) has a significant negative influence on Regional Government Financial Performance (Y). Simultaneously Local Own-Source Revenue and Balancing Funds have a significant influence on the Financial Performance of Local Governments. The value of the coefficient of determination (R square) is 0.288 which means that the variation of changes in the dependent variable can be explained by the independent variable by 28.8% while the remaining 71.2% can be explained by other variables outside the model in this study.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Balancing Fund, Regional Government Financial Performance*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2016 mengenai kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki

DPRD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran

penyelenggaraan urusan daerahnya (Budianto, 2016).

Dana Perimbangan adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Sumber Dana

Perimbangan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kinerja Keuangan merupakan mengenai ukuran dari suatu usaha yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi atau instansi tertentu melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sesuai aturan-aturan yang berlaku dengan baik dan benar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 4 No 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Menurut UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (Pasaribu,2020).

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hanya di tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah menurun dari 100,52% menjadi 97,79%, dan di Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan kembali menjadi 104,96%. Dana Perimbangan Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi pada Tahun 2017 mengalami penurunan dari 92,37% menjadi 78,47%, lalu di tahun 2018 meningkat kembali menjadi 173,94%. Dan di Tahun 2019

menurun kembali menjadi 91,39%.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan selalu lebih besar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Karena bertahun-tahun PAD dan retribusi ini tidak pernah sesuai target, padahal retribusi ini merupakan kewajiban masyarakat yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dan Dana Perimbangan setiap tahunnya selalu meningkat, artinya Provinsi Sumatera Selatan masih tergantung dengan Pemerintah Pusat. Dengan tidak tercapainya target ini mempengaruhi struktur APBD. Artinya Kinerja Keuangan Daerahnya harus diperbaiki.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015- 2019”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjelaskan definisi

otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Budianto (2016) berpendapat bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budianto, 2016). Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan oleh masyarakat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen Pendapatan Asli Daerah seperti retribusi daerah dan pajak secara langsung maupun tidak langsung akan membebani rakyat, sehingga komponen tersebut harus mendapatkan perhatian khusus.

Dana Perimbangan

Menurut Halim (2014:105) Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat

transfer dana lain di luar danaperimbangan.

Dana perimbangan meliputi:

- a. Dana bagi hasil pajak
- b. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
- c. Dana alokasi umum
- d. Dana alokasi khusus.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur.

Pasaribu (2020) Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Hubungan Antara Pendapatan Asli i Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen utama dalam keuangan daerah. Kemampuan dalam melaksanakan memaksimalkan pendapatan asli daerah akan berdampak pada keuangan daerah. Semakin maksimal pendapatan asli daerah, semakin baik keuangan daerah sehingga dapat membantu daerah untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan asli daerah mencerminkan potensi yang ada dalam daerah. Pendapatan asli daerah bersifat spesifik dan tidak akan bernilai sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fahira, Alkamal dan Maulina (2021), peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan

kinerja keuangan. Indikator

Pendapatan Asli Daerah

$PAD = Pajak\ daerah + hasil\ pengelolaan\ kekayaan\ yang\ dipisahkan + lain-$

lain pendapatan asli daerah yang sah

Hubungan Antara Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu perwujudan dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memainkan peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan keuangan daerah. Sebagaimana fakta dilapangan tidak semua daerah memiliki potensi pendapatan asli daerah yang sama untuk memaksimalkan. Oleh karena itu, dana perimbangan bisa menjadi sumber keuangan tambahan bagi daerah.

Semakin besar dana perimbangan, semakin besar sumber keuangan daerah sehingga akan mendorong kinerja keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahira, Alkamal dan Maulina (2021), yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Indikator Dana Perimbangan

Dana Perimbangan = Dana bagi hasil + dana alokasi umum + dana alokasi khusus

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah. Dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunannya.

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut berupa laporan realisasi APBD Tahun 2015-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data yang dapat di input kedalam skala pengukuran statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

merupakan data sekunder yang dari arsip laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut berupa laporan realisasi APBD Tahun 2015-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data yang dapat di input kedalam skala pengukuran statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dari arsip laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2015-2019. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 17 Kabupaten/Kota, yaitu terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota.

Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi APBD

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari Tahun 2015-2019. Metode pemilihan sampel pada penelitian ditentukan dengan metode *Sampling Jenuh*. *Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Dokumentasi. Data tersebut berupa laporan realisasi APBD Tahun 2015-2019. Yang diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id

Metode Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, variasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness.

Uji Asumsi Klasik

Terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik antara lain meliputi: asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan

autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antar dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan secara umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan pemerintah daerah

α = konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

e = error

Pengujian Hipotesis

Uji T

Uji t adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan

antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel bebas dengan t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% Dalam arti ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. Nilai Sig uji t lebih kecil sama dengan 0,05 H_1 diterima, yang artinya variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% Dalam arti ($\alpha = 0.05$). Apabila nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama sehingga dapat diterima. Nilai Sig dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y atau untuk mengetahui seberapa besar jumlah persentase dan kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis secara parsial yang telah diuraikan diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilikan potensi, pengggalian, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan

semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budianto (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin besar Pendapatan Asli Daerah, semakin baik kinerja keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Dengan pemahaman bahwa kinerja keuangan menunjukkan kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan (X₂) secara parsial hasil yang diperoleh bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, bahwa pemerintah daerah dalam penggunaan Dana Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana perimbangan maka akan mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengurangi penerimaan dana perimbangan dengan lebih meningkatkan pendapatan dari dalam daerahnya, sehingga dengan penerimaan dana perimbangan yang kecil pemerintah daerah dikatakan mampu untuk membiayai segala kebutuhan pemerintahannya dan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budianto (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pada pendapatan daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah

daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin menurun.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis secara simultan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota meningkat. Begitu juga dengan Dana perimbangan, semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah pusat akan menunjukkan tingginya ketegantungan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi

daerah yang artinya kinerja keuangan pemerintah menurun. Hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat digunakan sebagai alat ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai koefisien determinasi (R Square) pada penelitian ini sebesar 0,288 atau sama dengan 28,8% yang berarti bahwa variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 28,8% sedangkan sisanya 71,2% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai Negara di dunia.

Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang

sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Budianto (2016), melakukan penelitian yang berjudul “ pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018- 0 9”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun simultan. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang berarti kenaikan pendapatan asli daerah Pendapatan

Asli Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019 baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
2. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan sebesar 0,288. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 28,8% sedangkan sisanya sebesar 71,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah belum maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dengan melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah

intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lainnya. Dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat menggunakan pengukuran lain seperti Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, maka saran untuk penelitian berikutnya tidak hanya meneliti kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan saja namun dapat meneliti atau menambah kabupaten/kota yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto., S.W. Alexander. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba. Vol. 4. No.4.

- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIM YKPN
- Maulina, A., M.A., dan N.S Fahira. 2021. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jakarta*. Jurnal Akuntansi. Vol. 5. No. 2.
- Pasaribu, S.H. 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat*. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No. 2.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*.
- Priyatno, Duwi. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: RajawaliPers.
- Sunyoto, Danang. O . *“Analisis Regresi dan Uji Hipotesis”*.uku eru: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.djpk.kemenkeu.go.id
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan